

PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-AUSTRALIA; DAMPAK TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI NEGARA ANGGOTA

Mutiara Maharani¹, Martinus Alexander Simanjuntak², Maulana Jordan Alfadhil³,
Ema Septaria⁴, M. Ilham Adepio⁵

Email: mutiaramaharani1643@gmail.com , alexanderjuntak4@gmail.com ,
maulanajordan123@gmail.com , emaseptaria@unib.ac.id , miadepio@unib.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstrack

The Free Trade Agreement (FTA) between ASEAN and Australia is a significant milestone in Southeast Asia's regional economic relations. This agreement arises from the need to deepen economic integration and enhance trade between ASEAN countries and Australia. The mechanism within this agreement involves three main stages: negotiation, signing, and ratification. Additionally, the implementation and evaluation of the agreement are crucial factors in ensuring its effectiveness. Negotiations aim to establish the treaty text and accommodate the interests of all parties, whether through bilateral or multilateral formats. The signing of the agreement, as stipulated in the 1969 Vienna Convention, reflects the good faith of the participating states to be bound by its provisions. However, the agreement does not take effect until it undergoes ratification, which depends on each country's domestic legal framework. Ratification ensures that participating states are officially bound and obligated to implement the treaty in accordance with the principle of pacta sunt servanda. Following ratification, the implementation of the agreement is carried out

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

through national policies that support trade liberalization. Periodic evaluations are also necessary to adjust the agreement's provisions to global economic dynamics. Thus, the ASEAN-Australia FTA not only strengthens free trade but also reinforces the importance of international legal principles in economic agreements.

Keywords: *Free Trade Agreement, ASEAN, Australia, Negotiation, Signing, Ratification, Implementation, Evaluation, 1969 Vienna Convention.*

Abstrak

Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara ASEAN dan Australia merupakan tonggak penting dalam hubungan ekonomi regional Asia Tenggara. Perjanjian ini muncul dari kebutuhan untuk memperdalam integrasi ekonomi dan memperkuat perdagangan antara negara-negara ASEAN dan Australia. Mekanisme dalam perjanjian ini melibatkan beberapa tahap utama, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Selain itu, implementasi dan evaluasi perjanjian juga menjadi faktor krusial dalam memastikan efektivitasnya. Perundingan bertujuan menyepakati teks perjanjian dan mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik dalam format bilateral maupun multilateral. Penandatanganan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969, mencerminkan niat baik negara-negara pihak untuk terikat

pada ketentuannya. Namun, perjanjian belum efektif sebelum melewati tahap ratifikasi, yang bergantung pada hukum domestik masing-masing negara. Ratifikasi memastikan bahwa negara peserta secara resmi mengikatkan diri dan wajib melaksanakan perjanjian sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Setelah ratifikasi, implementasi perjanjian dilakukan melalui kebijakan nasional yang mendukung liberalisasi perdagangan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan perjanjian dengan dinamika ekonomi global. Dengan demikian, FTA ASEAN-Australia tidak hanya memperkuat perdagangan bebas tetapi juga menegaskan pentingnya prinsip hukum internasional dalam perjanjian ekonomi.

Kata kunci: Perjanjian Perdagangan Bebas, ASEAN, Australia, Perundingan, Penandatanganan, Ratifikasi, Implementasi, Evaluasi, Konvensi Wina 1969.

PENDAHULUAN

Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara ASEAN dan Australia merupakan tonggak penting dalam dinamika hubungan ekonomi regional Asia Tenggara. Perjanjian ini lahir dari kompleksitas interaksi ekonomi yang semakin mendalam antara negara-negara anggota ASEAN dan Auslia, yang memiliki implikasi signifikan terhadap kedaulatan ekonomi masing-masing negara¹. Free Trade Agreement (FTA) aASEAN-Australia bukanlah sekadar dokumen perdagangan biasa, melainkan instrumen strategis yang memiliki kekuatan transformatif dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih terbuka dan saling menguntungkan. Perjanjian ini dirancang untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, mendorong pertukaran barang, jasa², dan investasi di antara negara-negara anggota. Menyinggung hak dan kewajiban negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi yang diatur dalam Piagam ASEAN yang ditandatangani pada 2007 telah memberikan kerangka hukum dan normatif bagi kerja sama ekonomi antaranggota.

Dalam konteks kebijakan ekonomi, Piagam ASEAN menekankan beberapa prinsip fundamental antara lain; kesetaraan kedaulatan ekonomi setiap negara anggota, Prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, komitmen untuk mendorong integrasi ekonomi regional, dan Penghormatan terhadap kepentingan nasional masing-masing negara³. Perjanjian perdagangan bebas memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun tidak sepenuhnya mencabut kedaulatan ekonomi negara. Setiap negara anggota ASEAN tetap memiliki ruang untuk melindungi industri strategis nasional, mengatur kebijakan ekonomi domestic, menerapkan *safeguard mechanisms* untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional.

Sejak implementasinya, FTA ASEAN-Australia menghadirkan sejumlah isu kompleks, di antaranya ketimpangan ekonomi antaranggota, dampak terhadap industri loka, tantangan adaptasi regulasi, potensi intervensi ekonomi Australia terhadap negara-negara ASEAN. Kompleksitas ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang sejauh mana FTA memengaruhi kedaulatan ekonomi

¹ Pambudi, D., & Chandra, A. C. (2021). Capacity Asymmetries in ASEAN's Free Trade Agreements: The Case of AANZFTA. *Contemporary Southeast Asia*, 43(2), 273-298

² Maupa, H., & Asra, A. (2020). Labor Mobility Provisions in the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: Implications for Economic Sovereignty. *Journal of ASEAN Studies*, 8(1), 41-59

³ Anwar, S., & Carmody, L. (2023). Beyond Economic Metrics: A Holistic Approach to Evaluating Free Trade Agreements in ASEAN. *Singapore Economic Review*, 68(2), 345-370

negara-negara anggota ASEAN dan implikasi jangka panjangnya terhadap struktur ekonomi regional. lobilisasi dan integrasi ekonomi telah menjadi fenomena yang semakin mendalam dalam dinamika perekonomian dunia. Salah satu bentuk nyata dari integrasi tersebut adalah perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement* atau FTA) yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara. Salah satu FTA yang berperan penting di kawasan Asia-Pasifik adalah *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA), yang mulai berlaku pada tahun 2010⁴.

AANZFTA menciptakan kerangka kerja perdagangan yang lebih terbuka antara negara-negara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru, mencakup penghapusan tarif, perlindungan investasi, serta peningkatan akses pasar di berbagai sektor⁵. Dengan adanya perjanjian ini, negara-negara ASEAN diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonominya serta menarik lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menimbulkan berbagai tantangan, termasuk potensi hilangnya kedaulatan ekonomi nasional akibat meningkatnya ketergantungan pada pasar global dan investor asing.

Banyak negara anggota ASEAN yang masih bergantung pada sektor industri tertentu, seperti pertanian, manufaktur, dan sumber daya alam. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas ini, mereka harus bersaing dengan produk dan layanan dari Australia yang memiliki daya saing tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan industri lokal, kesejahteraan tenaga kerja, serta kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana dampak dari AANZFTA terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara ASEAN, serta sejauh mana kebijakan nasional masih dapat mengontrol arah pertumbuhan ekonomi masing-masing negara dalam lanskap perdagangan bebas.

Artikel ini akan mengkaji dampak dari AANZFTA terhadap kedaulatan ekonomi negara anggota ASEAN, mencakup aspek ketahanan industri lokal, keseimbangan perdagangan, serta kapasitas negara dalam mempertahankan kebijakan ekonomi yang mandiri di tengah tekanan

⁴ Abinales, P., Quimpo, N., & Tadem, T. (2022). Institutional Adaptation to Free Trade Agreements: A Comparative Study of ASEAN Countries. *Journal of Southeast Asian Studies*, 53(1), 78-96

⁵ ASEAN Secretariat. (2023). ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA): The First Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA. Jakarta: ASEAN Secretariat

liberalisasi global. Studi ini mencoba mengukur sejauh mana tingkat pemanfaatan FTA oleh lima negara mitra dagang utama Indonesia di ASEAN (Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam), ketika mengekspor barang ke Indonesia, dengan menggunakan data-data dokumen pemberitahuan impor barang (PIB). Dengan menggunakan PIB, maka informasi mengenai seberapa banyak fasilitas yang dimanfaatkan, FTA apa yang paling sering dimanfaatkan, serta negara mana yang paling banyak memanfaatkan dapat dianalisa lebih presisi yang belum pernah dibahas secara rinci mengenai kedaulatan ekonomi antara negara anggota ASEAN.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah konstruksi kekuatan hukum Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN-Australia dalam konteks kedaulatan ekonomi negara anggota?
2. Bagaimana seharusnya negara anggota ASEAN bersikap dalam menjaga kedaulatannya dalam konteks hukum internasional?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual. Metode ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum diplomatik modern memanfaatkan perlindungan diplomatik dan sanksi internasional dalam kasus Sergei Skripal.

a. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada data sekunder yang meliputi:

1. **Bahan hukum primer:** Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, dan sumber hukum lain terkait sanksi internasional.
2. **Bahan hukum sekunder:** Buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta dokumen resmi terkait hukum perjanjian internasional yang membahas kasus yang berkaitan dengan judul.
3. **Bahan hukum tersier:** Kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen lain yang mendukung pemahaman konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kedaulatan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan FTA

A. Proteksionisme Ekonomi ASEAN Sebelum Implementasi FTA

Sebelum adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) di ASEAN, negara-negara anggota menerapkan berbagai kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan global. Kebijakan ini berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, meningkatkan daya saing produk lokal, serta menghindari dominasi ekonomi oleh negara-negara besar. Proteksionisme ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan, termasuk tarif impor yang tinggi, hambatan non-tarif, pengaturan perdagangan preferensial, serta upaya mempertahankan kedaulatan ekonomi melalui regulasi yang ketat. Dengan adanya proteksionisme ini, negara-negara ASEAN berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri domestik, meskipun hal ini juga menghambat integrasi ekonomi regional.

Salah satu karakteristik utama proteksionisme sebelum FTA adalah penerapan kebijakan tarif dan non-tarif. Negara-negara ASEAN secara luas menggunakan tarif impor tinggi sebagai instrumen utama untuk melindungi industri dalam negeri. Selain itu, hambatan non-tarif seperti pembatasan kuota impor, regulasi teknis, serta prosedur administrasi yang kompleks juga diterapkan untuk membatasi akses produk asing ke pasar domestik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri lokal yang masih berkembang. Namun, proteksionisme ini juga memiliki dampak negatif, seperti peningkatan harga barang bagi konsumen domestik serta terbatasnya pilihan produk di pasar.⁶

Pada tahun 1977, ASEAN memperkenalkan Preferential Trading Arrangements (PTA) sebagai langkah awal menuju liberalisasi perdagangan intra-regional. Namun, PTA hanya memberikan preferensi tarif pada produk tertentu yang dipilih secara selektif, dengan negosiasi yang sering kali rumit dan terbatas. Hambatan non-tarif masih menjadi tantangan utama yang menghambat arus perdagangan bebas di kawasan ini. Akibatnya, meskipun PTA bertujuan mendorong perdagangan intra-ASEAN, dampaknya terhadap peningkatan integrasi ekonomi masih terbatas. Sebelum adanya

⁶ Ellen, R. (2016). Integrasi Ekonomi ASEAN Menuju ASEAN Economic Community Tahun 2015 (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10946/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>.

FTA, kebijakan proteksionisme ini cenderung membuat ASEAN tetap bergantung pada mitra dagang utama di luar kawasan, alih-alih memperkuat hubungan ekonomi antaranggota.⁷

Fokus utama negara-negara ASEAN pada masa sebelum FTA adalah mempertahankan kedaulatan ekonomi. Sebagai negara berkembang yang baru merdeka, banyak anggota ASEAN memberlakukan regulasi ketat guna menghindari dominasi ekonomi oleh negara-negara besar, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti energi, sumber daya alam, dan infrastruktur. Proteksionisme ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tetap berada dalam kendali nasional dan tidak bergantung pada kepentingan asing yang dapat merugikan stabilitas ekonomi domestik. Selain itu, pemerintah di berbagai negara ASEAN juga berupaya membangun industri nasional dengan memberikan subsidi dan insentif untuk sektor-sektor yang dianggap strategis, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.⁸

B. Ketergantungan Ekonomi

Sebelum adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), negara-negara ASEAN mengalami ketergantungan ekonomi yang signifikan, baik dalam konteks perdagangan intra-regional maupun dengan mitra besar seperti China dan Amerika Serikat. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan perdagangan antarnegara ASEAN melalui Preferential Trading Arrangements (PTA) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA), tingkat perdagangan intra-ASEAN hanya berkisar antara 20-25% dari total perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN masih lebih banyak bergantung pada perdagangan dengan negara-negara di luar kawasan. Hambatan berupa tarif impor, regulasi ketat, serta kebijakan proteksionisme di masing-masing negara turut membatasi pertumbuhan perdagangan di dalam kawasan sendiri.

Ketergantungan pada mitra besar seperti China dan Amerika Serikat menjadi tantangan lain bagi negara-negara ASEAN. Sebelum FTA, hubungan perdagangan dengan kedua negara ini sangat

⁷ Raniyah. (2014). *Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)* (Skripsi). Universitas Airlangga. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <https://repository.unair.ac.id/13773/3/3.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>.

⁸ TamaAndy. (2023). *Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN: Ini Prinsip dan Aturannya!*. Arahin. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <https://arahin.id/hub/post/kawasan-perdagangan-bebas-asean>.

dominan, di mana ASEAN mengimpor barang-barang manufaktur dan mengekspor produk primer. Ketergantungan ini menciptakan risiko bagi stabilitas ekonomi regional, terutama ketika terjadi fluktuasi ekonomi global.⁹ Ketika mitra dagang besar mengalami perlambatan ekonomi atau menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih protektif, negara-negara ASEAN pun terkena dampaknya. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi yang sulit diatasi tanpa adanya diversifikasi dalam perdagangan.¹⁰

Ketergantungan ekonomi ini juga berdampak pada kemandirian ekonomi ASEAN. Dengan kurangnya diversifikasi dalam pasar ekspor dan impor, negara-negara di kawasan ini menjadi rentan terhadap perubahan kondisi pasar global. Ketika harga komoditas turun atau kebijakan perdagangan mitra dagang berubah secara mendadak, ekonomi ASEAN dapat mengalami tekanan yang besar. Di sisi lain, kurangnya transfer teknologi dan investasi dalam industri lokal menyebabkan daya saing produk ASEAN lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju. Oleh karena itu, pendekatan proteksionisme yang diterapkan sebelum FTA lebih berfokus pada perlindungan industri domestik daripada meningkatkan daya saing global.¹¹

Sebagai respons terhadap ketergantungan ini, ASEAN berupaya meningkatkan integrasi ekonomi melalui pembentukan AFTA pada tahun 1992. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan volume perdagangan intra-regional, serta mengurangi ketergantungan pada mitra dagang besar. Namun, tantangan tetap ada karena masing-masing negara masih memiliki kebijakan proteksionis yang kuat untuk melindungi industri dalam negeri mereka. Langkah ini menandakan bahwa meskipun ASEAN ingin bergerak menuju ekonomi yang lebih terbuka, setiap negara tetap mempertahankan kendali atas sektor ekonomi strategis mereka.¹²

⁹ Titis Tri Rahayu, (2005) "Analisis Ketergantungan Ekspor-Impor 5 Negara ASEAN dan Cina dalam Membentuk ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)".

¹⁰ Intan Roosdiantoro, Ahmad Zafrullah TN., dan Firman Rosjadi Djoemadi, (2019) "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan MEA," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.7 No.2

¹¹ Banu Rinaldi, "Jangan Sampai Ketinggalan! Tren FTA yang Mengubah Permainan UMKM di Pasar Global," *UKMIndonesia.id*, html : <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/jangan-sampai-ketinggalan-tren-fta-yang-mengubah-permainan-umkm-di-pasar-global>. Diakses pada 19 Maret 2025.

¹² Ichsan Zulkarnaen, Rina Oktaviani, Mangara Tambunan, dan Yulius, "Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan Kawasan Ekonomi Asia terhadap Kinerja Ekonomi Makro ASEAN," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 1, no. 2 (2012): 104-119.

Oleh karena itu, upaya integrasi ekonomi melalui FTA menjadi kunci dalam menyeimbangkan kebutuhan proteksi ekonomi dengan manfaat perdagangan bebas.

Dampak Implementasi FTA

A. Penurunan Tarif Impor

Salah satu dampak utama dari implementasi FTA adalah penurunan tarif impor, yang membuat barang-barang dari Australia menjadi lebih terjangkau di pasar ASEAN. Hal ini menguntungkan konsumen karena mereka mendapatkan akses ke produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah.¹³ Namun, di sisi lain, produsen lokal di ASEAN menghadapi tantangan besar untuk bersaing dengan produk Australia yang lebih kompetitif. Beberapa industri domestik, terutama yang bergerak di sektor manufaktur dan agribisnis, mengalami tekanan akibat meningkatnya persaingan dari produk impor yang lebih efisien dan memiliki standar kualitas yang lebih tinggi.¹⁴

B. Meningkatnya Investasi

Selain itu, FTA juga berkontribusi pada meningkatnya investasi dari Australia ke ASEAN, khususnya di sektor jasa dan energi. Investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan keuangan semakin meningkat, memberikan manfaat bagi masyarakat ASEAN dalam bentuk akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas.¹⁵ Di sektor energi, Australia memainkan peran penting sebagai penyedia sumber daya yang mendukung kebutuhan industri di ASEAN. Meningkatnya investasi ini menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan, tetapi juga menuntut negara-negara ASEAN untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang lebih berpengalaman.¹⁶

¹³ Julia Xaviera, "Kepentingan Indonesia dalam Menyepakati Kerja Sama Indonesia Australia – Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)"(2019) Skripsi, Universitas Andalas. Html : <http://scholar.unand.ac.id/83349/2/2.%20BAB%20I.pdf>.

¹⁴ Maula Nurul Karim dan Poppy Ismalina, "Analisis Pengaruh ASEAN Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) terhadap Ekspor dan Impor Sektor Pertanian Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 1, no. 2 (2012): 104-119.

¹⁵ Elgi Putri dan Nia Kurniawati Hidayat, "Analisis Pengaruh Implementasi AANZFTA terhadap Kreasi dan Diversi Perdagangan Impor Daging Sapi di Indonesia," *Indonesian Journal of Agricultural Resource and Environmental Economics*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023, hlm. 110-123. Perdagangan Impor Daging Sapi di Indonesia," *Indonesian Journal of Agricultural Resource and Environmental Economics*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023, hlm. 110-123.

¹⁶ Eddy Mayor Putra Sitepu dan R. Nurhidayat,(2015) "Mengukur Tingkat Pemanfaatan FTA yang Telah Dilakukan

C. Akses Pasar Lebih Luas

Dampak lain yang muncul adalah terbukanya akses pasar yang lebih luas bagi negara-negara ASEAN untuk mengeksport produknya ke Australia. Produk pertanian, seperti buah-buahan tropis, kopi, dan hasil laut, mendapat manfaat dari penghapusan hambatan perdagangan yang sebelumnya menghambat ekspor. Selain itu, sektor manufaktur dan jasa di ASEAN juga memperoleh peluang baru untuk memperluas basis pelanggan mereka di pasar Australia. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini secara maksimal, produsen di ASEAN perlu memenuhi standar kualitas dan regulasi yang ketat yang diberlakukan oleh pasar Australia, yang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha kecil dan menengah.¹⁷

Secara keseluruhan, implementasi FTA antara ASEAN dan Australia membawa dampak yang beragam. Di satu sisi, perjanjian ini memberikan manfaat dalam bentuk penurunan biaya bagi konsumen, peningkatan investasi, serta akses pasar yang lebih luas bagi eksportir ASEAN. Namun, di sisi lain, perjanjian ini juga menghadirkan tantangan besar bagi produsen lokal dan UMKM yang harus bersaing dengan produk-produk impor yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang seimbang antara liberalisasi perdagangan dan kebijakan proteksi terhadap industri dalam negeri agar manfaat dari perjanjian ini dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Kedaulatan Ekonomi ASEAN Setelah Implementasi FTA dengan Australia

Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara ASEAN dan Australia telah membawa perubahan signifikan terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN. Perjanjian ini, yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan perdagangan antara kedua pihak, memiliki dampak yang kompleks, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah meningkatnya ketergantungan perdagangan ASEAN terhadap

Indonesia: Studi Kasus dengan Menggunakan FTA Preference Indicator," *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 19, no. 3 : 284-298.

¹⁷ Sari, Putu Gayatri Anindhya, Rina Oktaviana, dan Eka Puspitawati. (2018). "Dampak Keunggulan Komparatif dan Kerjasama ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) terhadap Perdagangan Indonesia." Tesis Magister, Institut Pertanian Bogor. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92625>.

Australia dalam sektor-sektor tertentu, yang berpotensi mempengaruhi kebijakan ekonomi domestik negara-negara anggota.

Salah satu dampak utama dari perjanjian ini adalah ketergantungan negara-negara ASEAN terhadap impor produk peternakan dan pertambangan dari Australia. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Australia telah menjadi pemasok utama daging sapi, hasil pertanian, dan bahan tambang ke negara-negara ASEAN. Ketergantungan ini menciptakan risiko ekonomi yang tidak dapat diabaikan, terutama jika terjadi fluktuasi harga atau gangguan dalam rantai pasokan global. Dalam kondisi krisis atau perubahan kebijakan di Australia, negara-negara ASEAN dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan yang stabil, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga dan daya beli masyarakat.¹⁸ Selain ketergantungan perdagangan, fleksibilitas kebijakan ekonomi negara-negara ASEAN juga diuji dalam menghadapi regulasi yang disyaratkan oleh FTA. Untuk tetap kompetitif, pemerintah di kawasan ini harus menyesuaikan regulasi ekonomi dengan prinsip liberalisasi perdagangan. Hal ini mencakup pengurangan tarif impor, penghapusan hambatan non-tarif, serta peningkatan transparansi dalam kebijakan investasi. Meskipun langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, negara-negara dengan sistem ekonomi yang lebih tertutup mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan standar internasional yang lebih ketat.¹⁹ Di sisi lain, perjanjian ini juga membuka peluang bagi ASEAN untuk mendapatkan manfaat dari transfer teknologi dan peningkatan daya saing di pasar global. Investasi Australia dalam bidang teknologi dan industri berpotensi mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produksi di negara-negara ASEAN. Namun, tantangan yang muncul adalah kesiapan negara-negara ASEAN dalam mengadopsi teknologi baru dan memenuhi standar internasional. Tanpa investasi yang memadai dalam pelatihan tenaga kerja dan penguatan kapasitas industri, negara-negara ASEAN dapat kesulitan memanfaatkan peluang ini secara maksimal.²⁰

¹⁸ Ahmad Fauzi, "Analisis Dampak AANZFTA terhadap Ekonomi Indonesia", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, Diakses pada 19 Maret 2025. html : <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/5802/4/Bab%20I.pdf>.

¹⁹ Ellen, R., *Op Cit*.

²⁰ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP)*, Diakses pada 19 Maret 2025. html : https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/rcep/na-ruu-rcep_compressed.pdf.

Salah satu tantangan terbesar yang muncul setelah implementasi FTA adalah potensi ketimpangan ekonomi di kawasan ASEAN. Negara-negara dengan industri yang lebih lemah atau yang kurang siap menghadapi persaingan global mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang lebih terbuka. Sementara negara-negara yang memiliki industri yang lebih maju dapat dengan mudah menyesuaikan kebijakan dan memanfaatkan peluang perdagangan bebas, negara-negara yang masih berkembang berisiko mengalami stagnasi atau bahkan penurunan daya saing. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara negara-negara ASEAN dan menciptakan tantangan baru dalam mencapai integrasi ekonomi yang seimbang.²¹

Secara keseluruhan, perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Australia membawa berbagai dampak yang signifikan terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara di kawasan ini. Meskipun perjanjian ini membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan daya saing global, tantangan seperti ketergantungan perdagangan, penyesuaian kebijakan ekonomi, transfer teknologi, serta ketimpangan ekonomi harus dikelola dengan strategi yang tepat. Dengan kebijakan yang responsif dan koordinasi yang kuat antara negara-negara anggota, ASEAN dapat memastikan bahwa manfaat dari perjanjian ini dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan di seluruh kawasan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Batasan Kewenangan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia

A. Struktur Kelembagaan dan Proses Pengambilan Keputusan

Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA) yang diperbarui pada tahun 2022 memiliki struktur kelembagaan yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan. Badan tertinggi dalam struktur ini adalah Komite Gabungan (Joint Committee) yang terdiri dari perwakilan masing-masing negara anggota. Komite ini memiliki kewenangan untuk

²¹ Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)", *Skripsi*, Universitas Airlangga, diakses pada 19 Maret 2025. html : <https://repository.unair.ac.id/13773/3/3.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>.

menginterpretasi ketentuan perjanjian, meninjau implementasi, dan membuat rekomendasi perubahan atau amandemen²².

Proses pengambilan keputusan dalam AANZFTA mengadopsi prinsip konsensus, yang berarti setiap keputusan harus disetujui oleh semua negara anggota. Pendekatan ini secara teoretis memberikan perlindungan kedaulatan bagi negara-negara yang lebih kecil, namun dalam praktiknya, bahwa dinamika kekuatan ekonomi seringkali memengaruhi proses negosiasi dan implementasi. Australia, dengan ekonomi yang lebih besar dan kapasitas institusional yang lebih kuat, memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan Keputusan.

Meskipun struktur kelembagaan AANZFTA mengedepankan kesetaraan formal, pada praktiknya terdapat ketidakseimbangan dalam hal kapasitas negosiasi dan implementasi. Negara-negara ASEAN dengan ekonomi yang lebih kecil seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) menghadapi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan²³.

B. Batasan Kewenangan Regulasi Domestik

Implementasi AANZFTA membawa implikasi signifikan terhadap kewenangan regulasi domestik negara-negara anggota. Perjanjian ini mencakup berbagai ketentuan yang membatasi ruang kebijakan pemerintah dalam beberapa sektor ekonomi strategis. Salah satu aspek penting adalah ketentuan mengenai National Treatment dan Market Access yang mengharuskan negara anggota untuk memperlakukan produk dan investor asing sama dengan produk dan investor domestik²⁴.

Terutama dalam sektor jasa dan investasi, AANZFTA mengadopsi pendekatan *negative list*, di mana liberalisasi merupakan default kecuali sektor-sektor yang secara eksplisit dikecualikan. Pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran tentang erosi kedaulatan ekonomi karena pemerintah

²² Suvannaphakdy, S. (2023). The New AANZFTA: Institutional Framework and Decision-Making Process. *ISEAS Perspective*, 2023(32), 1-14.

²³ Ravenhill, J. (2020). The Political Economy of the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement. *Contemporary Southeast Asia*, 42(3), 328-354.

²⁴ Kurniawan, A. (2022). Regulatory Space and Policy Autonomy in the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: Indonesia's Experience. *Indonesian Journal of International Law*, 19(3), 345-368

harus memperkirakan kebutuhan regulasi di masa depan dan mengamankan ruang kebijakan melalui reservasi yang eksplisit pada saat negosiasi²⁵.

Perjanjian ini juga mencakup ketentuan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (TRIPS-Plus) yang melebihi standar minimum WTO. Ketentuan ini membatasi fleksibilitas regulasi domestik dalam mengakomodasi kepentingan publik, khususnya dalam sektor kesehatan dan pendidikan²⁶.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investasi

Salah satu aspek paling kontroversial dari AANZFTA adalah mekanisme penyelesaian sengketa investasi, khususnya ketentuan Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Mekanisme ini memberikan hak kepada investor asing untuk menggugat pemerintah negara tuan rumah di arbitrase internasional jika mereka menganggap kebijakan pemerintah telah melanggar ketentuan perjanjian.

Mekanisme ISDS dalam AANZFTA menghasilkan pembatasan signifikan terhadap kewenangan regulasi negara-negara ASEAN. Hal ini karena pemerintah harus mempertimbangkan potensi gugatan investor ketika merancang kebijakan publik, fenomena yang disebut sebagai "*regulatory chill*." Revisi AANZFTA yang mulai berlaku pada 2022 telah memperkenalkan beberapa perbaikan dalam mekanisme ISDS, termasuk peningkatan transparansi dan klarifikasi tentang ruang lingkup "fair and equitable treatment" namun, (2023) reformasi ini belum cukup untuk menyeimbangkan hak investor dengan kedaulatan regulasi negara anggota²⁷.

D. Dampak Asimetris terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Anggota

Implementasi AANZFTA memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara anggota, tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi dan kapasitas institusional masing-masing negara. Negara-negara ASEAN dengan ekonomi yang lebih maju seperti Singapura

²⁵ Pakpahan, B. (2022). Negotiating Economic Sovereignty: ASEAN's Collective Strategy in the AANZFTA Upgrade Negotiations. *The Pacific Review*, 35(4), 687-714.

²⁶ Patunru, A., & Widodo, T. (2021). Intellectual Property Rights in the AANZFTA: Implications for Public Health and Education Policies in ASEAN Countries. *Journal of World Trade*, 55(2), 223-246.

²⁷ Nottage, L., & Thanitcul, S. (2023). Investment Dispute Resolution in the Updated AANZFTA: Progress and Remaining Challenges. *Asian Journal of International Law*, 13(1), 65-89

dan Malaysia cenderung lebih mampu mempertahankan kedaulatan ekonomi mereka dalam konteks implementasi AANZFTA²⁸.

Sebaliknya, negara-negara CLMV menghadapi tantangan signifikan dalam menyeimbangkan komitmen liberalisasi dengan kebutuhan untuk melindungi industri domestik dan mengejar kebijakan pembangunan yang berdaulat. Hal ini sebagian disebabkan oleh keterbatasan kapasitas institusional dan ketergantungan yang lebih besar pada perdagangan dengan Australia²⁹.

Asimetri ini juga terlihat dalam hal implementasi ketentuan AANZFTA mengenai pergerakan tenaga kerja. Pergerakan tenaga kerja terampil dari Australia ke negara-negara ASEAN cenderung lebih mudah dibandingkan sebaliknya, menciptakan ketidakseimbangan yang berpotensi memengaruhi pasar tenaga kerja domestik di negara-negara ASEAN.

E. Strategi Mempertahankan Kedaulatan Ekonomi dalam Kerangka AANZFTA

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, negara-negara ASEAN telah mengembangkan beberapa strategi untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi mereka dalam kerangka AANZFTA. Pertama, beberapa negara ASEAN telah secara efektif memanfaatkan pengecualian dan reservasi dalam perjanjian untuk melindungi sektor-sektor strategis. Kedua, negara-negara ASEAN telah berupaya memperkuat koordinasi intra-ASEAN untuk meningkatkan posisi tawar kolektif mereka dalam negosiasi dengan Australia. Pendekatan ini telah memungkinkan ASEAN untuk menegosiasikan ketentuan yang lebih menguntungkan dalam amandemen AANZFTA 2022. Ketiga, beberapa negara ASEAN telah mengembangkan kapasitas institusional untuk mengelola implementasi AANZFTA dengan lebih efektif. Ini termasuk pembentukan unit khusus dalam kementerian perdagangan yang bertanggung jawab untuk memantau dampak perjanjian dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. Terakhir, negara-negara ASEAN telah berupaya untuk mengintegrasikan AANZFTA dalam strategi pembangunan ekonomi yang lebih

²⁸ Cheong, I., & Tongzon, J. (2022). Trade and Investment Effects of the ASEAN-Australia-New Zealand FTA: Asymmetric Impacts and Policy Implications. *Journal of Southeast Asian Economies*, 39(2), 87-106.

²⁹ (Legaspi, J. (2021). The CLMV Countries in the AANZFTA: Development Challenges and Strategic Responses. *Asia Pacific Economic Papers*, 417, 1-28.

luas. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara ASEAN untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh AANZFTA sambil tetap mempertahankan tujuan pembangunan nasional mereka.

KESIMPULAN

Konstruksi kekuatan hukum Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia menunjukkan kompleksitas yang signifikan dalam konteks kedaulatan ekonomi negara anggota. Melalui analisis terhadap mekanisme pengambilan keputusan, ketentuan substantif, dan mekanisme penyelesaian sengketa, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini menciptakan kerangka hukum yang mengikat yang secara formal mengakui kedaulatan negara anggota namun secara praktis menimbulkan pembatasan-pembatasan tertentu dalam ruang kebijakan ekonomi nasional. Ketentuan-ketentuan seperti national treatment, perlindungan investasi, dan ISDS menghasilkan implikasi yang tidak simetris terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara ASEAN, terutama bagi negara-negara dengan kapasitas institusional dan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih rendah.

Dalam menjaga kedaulatannya, negara-negara anggota ASEAN perlu mengadopsi pendekatan multidimensi yang mencakup penguatan kapasitas institusional, peningkatan koordinasi intra-ASEAN, dan pengembangan strategi implementasi yang cermat. Penggunaan secara strategis terhadap fleksibilitas dan pengecualian yang tersedia dalam perjanjian menjadi krusial untuk melindungi sektor-sektor ekonomi strategis dan melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, negara-negara ASEAN perlu secara aktif terlibat dalam proses revisi dan evaluasi perjanjian untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang dihasilkan lebih seimbang dalam hal distribusi manfaat dan pembatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pambudi, D., & Chandra, A. C. (2021). Capacity Asymmetries in ASEAN's Free Trade Agreements: The Case of AANZFTA. *Contemporary Southeast Asia*, 43(2), 273-298
- Maupa, H., & Asra, A. (2020). Labor Mobility Provisions in the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: Implications for Economic Sovereignty. *Journal of ASEAN Studies*, 8(1), 41-59
- Anwar, S., & Carmody, L. (2023). Beyond Economic Metrics: A Holistic Approach to Evaluating Free Trade Agreements in ASEAN. *Singapore Economic Review*, 68(2), 345-370
- Abinales, P., Quimpo, N., & Tadem, T. (2022). Institutional Adaptation to Free Trade Agreements: A Comparative Study of ASEAN Countries. *Journal of Southeast Asian Studies*, 53(1), 78-96
- ASEAN Secretariat. (2023). ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA): The First Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA. Jakarta: ASEAN Secretariat
- Ellen, R. (2016). Integrasi Ekonomi ASEAN Menuju ASEAN Economic Community Tahun 2015 (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10946/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>.
- Raniyah. (2014). Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) (Skripsi). Universitas Airlangga. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <https://repository.unair.ac.id/13773/3/3.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>.
- TamaAndy. (2023). Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN: Ini Prinsip dan Aturannya!. Arahin. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <https://arahin.id/hub/post/kawasan-perdagangan-bebas-asean>.
- Titis Tri Rahayu, (2005) "Analisis Ketergantungan Ekspor-Impor 5 Negara ASEAN dan Cina dalam Membentuk ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)".
- Intan Roosdiantoro, Ahmad Zafrullah TN., dan Firman Rosjadi Djoemadi, (2019) "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan MEA," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.7 No.2
- Banu Rinaldi, "Jangan Sampai Ketinggalan! Tren FTA yang Mengubah Permainan UMKM di Pasar Global," *UKMIndonesia.id*, html : <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/jangan-sampai-ketinggalan-tren-fta-yang-mengubah-permainan-umkm-di-pasar-global>. Diakses pada 19 Maret 2025.

Ichsan Zulkarnaen, Rina Oktaviani, Mangara Tambunan, dan Yulius, "Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan Kawasan Ekonomi Asia terhadap Kinerja Ekonomi Makro ASEAN," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 1, no. 2 (2012): 104-119.

Julia Xaviera, "Kepentingan Indonesia dalam Menyetujui Kerja Sama Indonesia Australia – Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)"(2019) Skripsi, Universitas Andalas. Html : <http://scholar.unand.ac.id/83349/2/2.%20BAB%20I.pdf>.

Maula Nurul Karim dan Poppy Ismalina, "Analisis Pengaruh ASEAN Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) terhadap Ekspor dan Impor Sektor Pertanian Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 1, no. 2 (2012): 104-119.

Elgi Putri dan Nia Kurniawati Hidayat, "Analisis Pengaruh Implementasi AANZFTA terhadap Kreasi dan Diversi Perdagangan Impor Daging Sapi di Indonesia," *Indonesian Journal of Agricultural Resource and Environmental Economics*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023, hlm. 110-123. "Perdagangan Impor Daging Sapi di Indonesia," *Indonesian Journal of Agricultural Resource and Environmental Economics*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023, hlm. 110-123.

Eddy Mayor Putra Sitepu dan R. Nurhidayat,(2015) "Mengukur Tingkat Pemanfaatan FTA yang Telah Dilakukan

Indonesia: Studi Kasus dengan Menggunakan FTA Preference Indicator," *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 19, no. 3 : 284-298.

Sari, Putu Gayatri Anindhya, Rina Oktaviana, dan Eka Puspitawati. (2018). "Dampak Keunggulan Komparatif

dan Kerjasama ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) terhadap Perdagangan Indonesia." Tesis Magister, Institut Pertanian Bogor. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92625>.

Ahmad Fauzi, "Analisis Dampak AANZFTA terhadap Ekonomi Indonesia", Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta, 2020, Diakses pada 19 Maret 2025. html : <https://etd.ums.ac.id/id/eprint/5802/4/Bab%20I.pdf>.

Ellen, R., Op Cit.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang

Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), Diakses pada 19 Maret 2025. html : https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/rcep/na-ruu-rcep_compressed.pdf.

Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)", Skripsi,

Universitas Airlangga, diakses pada 19 Maret 2025. html :
<https://repository.unair.ac.id/13773/3/3.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>.

Suvannaphakdy, S. (2023). The New AANZFTA: Institutional Framework and Decision-Making Process. *ISEAS Perspective*, 2023(32), 1-14.

Ravenhill, J. (2020). The Political Economy of the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement. *Contemporary Southeast Asia*, 42(3), 328-354.

Kurniawan, A. (2022). Regulatory Space and Policy Autonomy in the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: Indonesia's Experience. *Indonesian Journal of International Law*, 19(3), 345-368

Pakpahan, B. (2022). Negotiating Economic Sovereignty: ASEAN's Collective Strategy in the AANZFTA Upgrade Negotiations. *The Pacific Review*, 35(4), 687-714.

Patunru, A., & Widodo, T. (2021). Intellectual Property Rights in the AANZFTA: Implications for Public Health and Education Policies in ASEAN Countries. *Journal of World Trade*, 55(2), 223-246.

Nottage, L., & Thanitcul, S. (2023). Investment Dispute Resolution in the Updated AANZFTA: Progress and Remaining Challenges. *Asian Journal of International Law*, 13(1), 65-89

Cheong, I., & Tongzon, J. (2022). Trade and Investment Effects of the ASEAN-Australia-New Zealand FTA: Asymmetric Impacts and Policy Implications. *Journal of Southeast Asian Economies*, 39(2), 87-106.

(Legaspi, J. (2021). The CLMV Countries in the AANZFTA: Development Challenges and Strategic Responses. *Asia Pacific Economic Papers*, 417, 1-28.